

# LAPORAN BULANAN

MEI 2026



Badan Pengarah Papua  
Perwakilan Provinsi Papua



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Selama bulan Mei 2026, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap isu-isu strategis pembangunan, implementasi Otonomi Khusus Papua, pendidikan, kesehatan, serta stabilitas sosial kemasyarakatan di Tanah Papua.

Pada aspek tata kelola Otonomi Khusus, BP3OKP berpartisipasi dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dan Otonomi Khusus Papua Tahun 2026 di Timika yang menghasilkan berbagai masukan terkait penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, harmonisasi regulasi, interoperabilitas sistem pengelolaan pembangunan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pascapemekaran wilayah di Papua. Forum tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain efektivitas pengelolaan Dana Otsus, rendahnya realisasi anggaran pembangunan, keterbatasan data Orang Asli Papua (OAP), serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan dasar dan konektivitas wilayah.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, BP3OKP menerima serta menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terdampak kebijakan akademik dan status drop out (DO), serta aspirasi dokter internship dan koas terkait kebijakan penempatan di luar wilayah Papua. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan kementerian terkait guna memastikan keberlanjutan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, serta keberpihakan kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah Papua.



Pada aspek sosial kemasyarakatan, BP3OKP melaksanakan fasilitasi dialog dan koordinasi terkait dinamika internal Gereja Bethel Gereja Pentakosta (GBGP) di Tanah Papua serta berbagai isu kemasyarakatan lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga harmonisasi sosial, stabilitas kehidupan beragama, dan mendukung penyelesaian permasalahan melalui pendekatan koordinatif sesuai fungsi dan kewenangan BP3OKP.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama bulan Mei 2026, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis yang berkembang di Papua. Selain itu, perlu dilakukan pengawalan terhadap implementasi rekomendasi hasil Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dan Otonomi Khusus Papua, khususnya terkait penguatan tata kelola Dana Otsus, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan basis data Orang Asli Papua, serta percepatan pelaksanaan program prioritas Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.





1. Kegiatan Strategis  
Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua (BPP) / Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah melaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut:

**Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua**

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Sosialisai kegiatan peremajaan sawit Rakyat di Aula BAPPERINDA Kab. Keerom	Selasa 5 Mei 2026	Menyelesaikan kendala administrative serta mempercepat pelaksanaan Peremajaan Sawit di Wilayah Keerom	Sekda Kab. Keerom menegaskan bahwa, segala pengurusan terkait ijin lahan, pembibitan serta hal teknis lain wajib diselesaikan dalam waktu singkat.	
2.	Melaksanakan diskusi bersama dokter internship terkait permasalahan penempatan koas/dokter muda lulusan Universitas Cenderawasih yang ditempatkan di luar wilayah Papua.	Kamis 7 Mei 2026	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendengarkan dan menghimpun aspirasi serta keluhan dokter internship/koas lulusan Universitas Cenderawasih terkait penempatan di luar wilayah Papua</li> <li>Mengidentifikasi kendala yang dihadapi peserta, khususnya terkait biaya, akses, dan pelaksanaan pendidikan profesi di luar Papua;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Para dokter internship/koas menyampaikan keluhan terkait penempatan di luar wilayah Papua yang dinilai memberatkan dari sisi biaya hidup, transportasi, dan kebutuhan selama menjalani pendidikan profesi;</li> <li>Peserta mempertanyakan kebijakan penempatan di luar Papua serta meminta penjelasan terkait dasar dan mekanisme penempatan tersebut;</li> <li>Dalam diskusi, peserta berharap adanya solusi dan perhatian dari pemerintah serta pihak terkait agar penempatan dokter muda lulusan Papua dapat lebih mempertimbangkan</li> </ol>	



				kondisi sosial, ekonomi, dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP).	
3.	Kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dengan Anggota BP3OKP di Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	Jumat 8 Mei 2026	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan kelembagaan antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dengan BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua;</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;</li> <li>3. Bertukar informasi dan pandangan terkait kondisi serta dinamika strategis di wilayah Papua.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pertemuan silaturahmi dan koordinasi antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dengan Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua;</li> <li>2. Terbangunnya komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan;</li> <li>3. Adanya kesepahaman untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi terkait isu-isu strategis di Papua.</li> </ol>	
4.	Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua: "Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera" di Hotel Horison Diana Timika.	10 s.d. 13 Mei 2026	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP3OKP, serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua;</li> <li>2. Mengevaluasi pelaksanaan Otsus Papua, khususnya terkait pengelolaan Dana Otsus,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua dan Otonomi Khusus Papua Tahun 2026 sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah;</li> <li>2. Tersampainya evaluasi pelaksanaan Otsus Papua yang menunjukkan masih terdapat tantangan pada aspek kesejahteraan masyarakat, pengelolaan Dana Otsus, rendahnya realisasi APBD, keterbatasan data OAP, dan</li> </ol>	



			<p>efektivitas pembangunan, serta tantangan implementasi di daerah;</p> <p>3. Mendorong sinkronisasi kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan sistem pengawasan pembangunan Papua melalui penguatan interoperabilitas sistem dan pelaksanaan RAPPP;</p> <p>4. Menghimpun aspirasi, masukan, dan usulan daerah terkait kebijakan fiskal, regulasi, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan pembangunan daerah di Tanah Papua.</p>	<p>lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan;</p> <p>3. Disepakatinya penguatan tata kelola Dana Otsus melalui interoperabilitas sistem SIPPP, SIPD, dan SIKD guna mendukung perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi berbasis data;</p> <p>4. Adanya komitmen pembentukan task force interoperabilitas di tingkat pusat dan daerah guna mendukung implementasi sistem pengelolaan Dana Otsus Tahun 2027;</p> <p>5. Tersampainya berbagai aspirasi daerah terkait revisi regulasi Otsus, formula pembagian Dana Otsus, penguatan kewenangan daerah, penanganan masalah pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah Papua;</p> <p>6. Menguatnya komitmen bersama dalam mendukung implementasi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagai prioritas pembangunan Papua.</p>	
5.	Mediasi dan penyampaian penjelasan mengenai status serta hak atas tanah terkait operasional Fuel Terminal Serui PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua, di Kapolres Kepulauan	Selasa 12 Mei 2026	1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua kepada Anggota Badan Pengarah Percepatan	1. Terlaksananya Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua dan Otonomi Khusus Papua sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah; 2. Teridentifikasinya berbagai tantangan implementasi Otsus	




	<p>Yapen AKBP Ardyan Ukie Hercahyo S.IK.,M.I.K</p>		<p>Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyampaikan hasil pembahasan dan perkembangan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua, khususnya terkait pengelolaan Dana Otsus dan percepatan pembangunan daerah;</li> <li>3. Menyampaikan aspirasi, masukan, dan permasalahan strategis yang berkembang dalam forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Tanah Papua.</li> </ol>	<p>Papua, antara lain pengelolaan Dana Otsus, rendahnya realisasi APBD, keterbatasan data Orang Asli Papua (OAP), konektivitas wilayah, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas keamanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersampainya berbagai usulan daerah terkait penyesuaian kebijakan fiskal, revisi regulasi Otsus, penguatan kewenangan daerah, serta peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga;</li> <li>4. Menguatnya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif melalui penguatan tata kelola pembangunan dan Dana Otsus.</li> </ol>	
<p>6.</p>	<p>Audiensi Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.</p>	<p>Selasa 19 Mei 2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendengar aspirasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih terkait permasalahan akademik dan status drop out mahasiswa;</li> <li>2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa akibat perubahan kebijakan masa studi dan kendala administrasi akademik;</li> <li>3. Mendorong koordinasi dan penyelesaian permasalahan antara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasinya permasalahan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terdampak perubahan kebijakan masa studi dari 14 semester menjadi 12 semester;</li> <li>2. Mahasiswa menyampaikan kendala terkait status portal akademik, nilai yang belum terinput, kegagalan mengikuti yudisium, pengakuan cuti akademik, serta tunggakan pembayaran;</li> <li>3. Ditemukan adanya ketidaksinkronan koordinasi dan informasi antara pihak Program Studi, PD-1, Dekanat,</li> </ol>	



			<p>mahasiswa dengan pihak Fakultas Kedokteran dan Rektorat Universitas Cenderawasih.</p>	<p>dan Rektorat terkait kebijakan transisi masa studi;</p> <p>4. BP3OKP melalui Pokja Papua Sehat dan Papua Cerdas akan melakukan pendataan, wawancara, dan koordinasi lanjutan guna mendukung penyelesaian permasalahan mahasiswa terdampak.</p>	
7.	<p>Rapat Koordinasi bersama Rektor UNCEN terkait Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN dan dokter internship terkait permasalahan penempatan koas/dokter muda lulusan Universitas Cenderawasih yang ditempatkan di luar wilayah Papua, Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.</p>	<p>Kamis 21 Mei 2026</p>	<p>Pertemuan Bersama dengan Pihak Kampus membahas rencana tindak lanjut terkait Mahasiswa FK Uncen yang terancam DO</p>	<p>Akan di taindakanlanjuti lebih lanjut dalam koordinasi langsung ke Kampus Oleh BP3OKP</p>	
8.	<p>Diskusi penyampaian dan pembahasan terkait sengketa organisasi dalam denominasi Gereja Bethel Gereja Pantakosta di Tanah Papua sertda tindak lanjut atas putusan PTUN di Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.</p>	<p>Jumat 22 Mei 2026</p>	<p>1. Menindaklanjuti dan mengidentifikasi permasalahan internal Gereja Bethel Gereja Pentekosta (GBGP) di Tanah Papua pasca putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>2. Membangun komunikasi dan</p>	<p>1. Terlaksananya rapat koordinasi dan pembahasan awal terkait permasalahan internal GBGP di Tanah Papua;</p> <p>2. Teridentifikasinya sejumlah permasalahan yang berkembang pasca putusan Mahkamah Agung, termasuk keberadaan 369 jemaat yang tetap berada di bawah BPP GBGP;</p>	



			<p>koordinasi antara BP3OKP RI dan BPP GBGP dalam rangka menjaga harmonisasi hubungan antar unsur agama dan pemerintah di Tanah Papua;</p> <p>3. Menghimpun data, dokumen, dan informasi terkait aspek historis, yuridis, dan sosiologis dalam dinamika internal GBGP sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut.</p>	<p>3. Tersampainya informasi dan dokumen terkait sejarah, legalitas, dan dinamika organisasi GBGP sebagai bahan pendalaman lebih lanjut oleh BP3OKP RI;</p> <p>4. BP3OKP RI menegaskan posisinya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) tanpa mengambil posisi terhadap substansi sengketa;</p> <p>5. Adanya arahan agar pelayanan jemaat tetap berjalan dengan baik serta menjaga situasi yang kondusif selama proses penanganan berlangsung.</p>	
9.	Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Penyusunan Komitmen Kemitraan Bersama Mitra Pembangunan Pendidikan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2026	22 s.d. 24 Mei 2026	Membahas bagaimana membangun mitra/kerja sama dengan BPMP Prov Papua	Rencana Tindak Lanjut Kerjasama dalam Hal Data Pendidikan dan Data Siswa OAP	



**Rekomendasi Kegiatan Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua**

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Sosialisai kegiatan peremajaan sawit Rakyat di Aula BAPPERINDA Kabupaten Keerom	Kelapa sawit pernah mengangkat PAD Keerom sehingga dikatakan Keerom Berjaya karena sawit. Hal ini perlu dilakukan kembali, melalui peremajaan sawit, kab. Keerom akan kembali Berjaya (PAD meningkat).
2.	Melaksanakan diskusi bersama dokter internship terkait permasalahan penempatan koas/dokter muda lulusan Universitas Cenderawasih yang ditempatkan di luar wilayah Papua.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak Uncen dan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme serta kebijakan penempatan dokter muda lulusan Papua;</li><li>2. Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan penempatan di luar Papua dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kondisi sosial peserta;</li><li>3. Perlu didorong kebijakan yang memberikan prioritas penempatan dokter muda lulusan Papua di wilayah Papua sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan daerah.</li></ol>
3.	Kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dengan Anggota BP3OKP di Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dan BP3OKP dalam mendukung stabilitas dan percepatan pembangunan di Papua;</li><li>2. Perlu memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;.</li></ol>
4.	Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua: "Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera" di Hotel Horison Diana Timika.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP3OKP, dan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan Otsus Papua;</li><li>2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap formula pembagian Dana Otsus serta penyesuaian kebijakan fiskal pascapemekaran enam provinsi di Papua;</li><li>3. Perlu percepatan implementasi interoperabilitas sistem SIPPP, SIPD, dan SIKD disertai pendampingan teknis dan penguatan kapasitas SDM/operator di daerah;</li><li>4. Perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi terkait Otsus Papua, termasuk UU Otsus, PP Nomor 106 dan 107 Tahun 2021, serta PMK terkait pengelolaan Dana Otsus;</li><li>5. Perlu adanya perhatian khusus terhadap permasalahan pendidikan, kesehatan, stabilitas keamanan, konektivitas wilayah, dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil dan DOB;</li><li>6. Perlu dilakukan penguatan pengawasan dan tata kelola Dana Otsus agar lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP);</li></ol>



**Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua**  
*GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua*

		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Perlu dilaksanakan forum koordinasi lanjutan secara berkala guna memantau tindak lanjut kebijakan, program prioritas, dan penyelesaian berbagai permasalahan strategis di Tanah Papua.</li></ol>
5.	Mediasi dan penyampaian penjelasan mengenai status serta hak atas tanah terkait operasional Fuel Terminal Serui PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua, di Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardyan Ukie Hercahyo S.IK.,M.I.K	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BP3OKP dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua;</li><li>2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap formula pembagian Dana Otsus serta kebijakan fiskal pascapemekaran enam provinsi di Papua;</li><li>3. Perlu percepatan harmonisasi regulasi terkait Otsus Papua guna mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah;</li><li>4. Perlu penguatan tata kelola, pengawasan, dan interoperabilitas sistem pengelolaan Dana Otsus agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;</li><li>5. Perlu adanya perhatian khusus terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan, konektivitas wilayah, dan stabilitas keamanan di wilayah Papua, khususnya daerah terpencil dan Daerah Otonom Baru (DOB).</li></ol>
6.	Audiensi Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan Dekan Fakultas Kedokteran, PD-1, Ketua Program Studi, dan Rektorat Universitas Cenderawasih terkait kebijakan transisi masa studi mahasiswa;</li><li>2. Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap mahasiswa terdampak, termasuk status akademik, nilai, portal akademik, dan tunggakan pembayaran;</li><li>3. Perlu adanya penyampaian kebijakan dan solusi akademik secara tertulis dan transparan kepada mahasiswa terdampak;</li><li>4. Perlu dipertimbangkan kebijakan transisi dan penyelesaian akademik bagi mahasiswa tingkat akhir yang terdampak perubahan masa studi;</li><li>5. Perlu dilakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap mahasiswa terdampak dalam proses penyelesaian administrasi dan akademik.</li></ol>
7.	Rapat Koordinasi bersama Rektor UNCEN terkait Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN dan dokter internship terkait permasalahan penempatan koas/dokter muda lulusan Universitas Cenderawasih yang ditempatkan di luar wilayah Papua, Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	Koordinasi dengan Pihak Kemenkes terkait Status Ban (Karena Menolak Wahana) & Penempatan Wahana Lokal untuk periode agustus 2026
8.	Diskusi penyampaian dan pembahasan terkait sengketa organisasi dalam denominasi Gereja Bethel Gereja Pantakosta di Tanah Papua sertda tindak lanjut atas putusan PTUN di Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan penelusuran dan pendalaman lebih lanjut terhadap dokumen, aspek historis, dan aspek yuridis terkait permasalahan internal GBGP;</li></ol>



**Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua**  
*GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua*

---

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Perlu dilakukan koordinasi dengan lembaga peradilan, kementerian/lembaga terkait, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh kejelasan terhadap tindak lanjut putusan hukum;</li><li>3. Perlu menjaga kondusivitas dan harmonisasi hubungan antar jemaat serta menghindari tindakan yang dapat menghambat pelayanan gereja;</li><li>4. Perlu dibangun forum komunikasi sementara sebagai wadah koordinasi informasi antar majelis dan gembala jemaat guna menjamin keberlangsungan pelayanan;</li><li>5. Perlu dilakukan fasilitasi dan pendekatan koordinatif secara berkelanjutan oleh BP3OKP RI dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan harmonisasi kehidupan beragama di Tanah Papua.</li></ol>
9.	Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Penyusunan Komitmen Kemitraan Bersama Mitra Pembangunan Pendidikan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2026	Rencana Tindak Lanjut untuk Kerjasama terkait Data Pendidikan & Data Siswa OAP

# POKJA PAPUA POLHUKAM



**BPP**

BADAN PENGARAH PAPUA



**MEI 2026**

Badan Pengarah Papua

Perwakilan Provinsi Papua



**PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA POLHUKAM BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN MEI 2026**

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dengan Anggota BP3OKP di Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	Jumat 8 Mei 2026	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan kelembagaan antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dengan BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua;</li><li>2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;</li><li>3. Bertukar informasi dan pandangan terkait kondisi serta dinamika strategis di wilayah Papua.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya pertemuan silaturahmi dan koordinasi antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dengan Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua;</li><li>2. Terbangunnya komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan;</li><li>3. Adanya kesepahaman untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi terkait isu-isu strategis di Papua.</li></ol>	
2.	Diskusi penyampaian dan pembahasan terkait sengketa organisasi dalam denominasi Gereja Bethel Gereja Pantakosta di Tanah Papua serta tindak lanjut atas putusan PTUN di Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	Jumat 22 Mei 2026	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menindaklanjuti dan mengidentifikasi permasalahan internal Gereja Bethel Gereja Pentekosta (GBGP) di Tanah Papua pasca putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;</li><li>2. Membangun komunikasi dan koordinasi antara BP3OKP RI dan BPP GBGP dalam rangka</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya rapat koordinasi dan pembahasan awal terkait permasalahan internal GBGP di Tanah Papua;</li><li>2. Teridentifikasinya sejumlah permasalahan yang berkembang pasca putusan Mahkamah Agung, termasuk keberadaan 369 jemaat yang tetap berada di bawah BPP GBGP;</li><li>3. Tersampainya informasi dan dokumen terkait sejarah, legalitas, dan</li></ol>	



			<p>menjaga harmonisasi hubungan antar unsur agama dan pemerintah di Tanah Papua;</p> <p>3. Menghimpun data, dokumen, dan informasi terkait aspek historis, yuridis, dan sosiologis dalam dinamika internal GBGP sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut.</p>	<p>dinamika organisasi GBGP sebagai bahan pendalaman lebih lanjut oleh BP3OKP RI;</p> <p>4. BP3OKP RI menegaskan posisinya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) tanpa mengambil posisi terhadap substansi sengketa;</p> <p>5. Adanya arahan agar pelayanan jemaat tetap berjalan dengan baik serta menjaga situasi yang kondusif selama proses penanganan berlangsung.</p>	
--	--	--	---	---	--



**REKOMENDASI KEGIATAN**  
**KELOMPOK KERJA POLHUKAM BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN MEI 2026**

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dengan Anggota BP3OKP di Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan antara Badan Intelijen Negara Daerah Papua dan BP3OKP dalam mendukung stabilitas dan percepatan pembangunan di Papua;</li><li>2. Perlu memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;.</li></ol>
2.	Diskusi penyampaian dan pembahasan terkait sengketa organisasi dalam denominasi Gereja Bethel Gereja Pantakosta di Tanah Papua sertda tindak lanjut atas putusan PTUN di Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan penelusuran dan pendalaman lebih lanjut terhadap dokumen, aspek historis, dan aspek yuridis terkait permasalahan internal GBGP;</li><li>2. Perlu dilakukan koordinasi dengan lembaga peradilan, kementerian/lembaga terkait, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh kejelasan terhadap tindak lanjut putusan hukum;</li><li>3. Perlu menjaga kondusivitas dan harmonisasi hubungan antar jemaat serta menghindari tindakan yang dapat menghambat pelayanan gereja;</li><li>4. Perlu dibangun forum komunikasi sementara sebagai wadah koordinasi informasi antar majelis dan gembala jemaat guna menjamin keberlangsungan pelayanan;</li><li>5. Perlu dilakukan fasilitasi dan pendekatan koordinatif secara berkelanjutan oleh BP3OKP RI dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan harmonisasi kehidupan beragama di Tanah Papua.</li></ol>

# POKJA PAPUA CERDAS



**BPP**

BADAN PENGARAH PAPUA


**MEI 2026**

Badan Pengarah Papua



Perwakilan Provinsi Papua



**PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA CERDAS BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN MEI 2026**

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Audiensi Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	Selasa 19 Mei 2026	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendengar aspirasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih terkait permasalahan akademik dan status drop out mahasiswa;</li><li>2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa akibat perubahan kebijakan masa studi dan kendala administrasi akademik;</li><li>3. Mendorong koordinasi dan penyelesaian permasalahan antara mahasiswa dengan pihak Fakultas Kedokteran dan Rektorat Universitas Cenderawasih.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teridentifikasinya permasalahan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terdampak perubahan kebijakan masa studi dari 14 semester menjadi 12 semester;</li><li>2. Mahasiswa menyampaikan kendala terkait status portal akademik, nilai yang belum terinput, kegagalan mengikuti yudisium, pengakuan cuti akademik, serta tunggakan pembayaran;</li><li>3. Ditemukan adanya ketidaksinkronan koordinasi dan informasi antara pihak Program Studi, PD-1, Dekanat, dan Rektorat terkait kebijakan transisi masa studi;</li><li>4. BP3OKP melalui Pokja Papua Sehat dan Papua Cerdas akan melakukan pendataan, wawancara, dan koordinasi lanjutan guna mendukung penyelesaian permasalahan mahasiswa terdampak.</li></ol>	



2.	Rapat Koordinasi bersama Rektor UNCEN terkait Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN dan dokter internship terkait permasalahan penempatan koas/dokter muda lulusan Universitas Cenderawasih yang ditempatkan di luar wilayah Papua, Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	Kamis 21 Mei 2026	Pertemuan Bersama dengan Pihak Kampus membahas rencana tindak lanjut terkait Mahasiswa FK Uncen yang terancam DO	Akan di taindakanjuti lebih lanjut dalam koordinasi langsung ke Kampus Oleh BP3OKP	
3.	Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Penyusunan Komitmen Kemitraan Bersama Mitra Pembangunan Pendidikan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2026	22 s.d. 24 Mei 2026	Membahas bagaimana membangun mitra/kerja sama dengan BPMP Prov Papua	Rencana Tindak Lanjut Kerjasama dalam Hal Data Pendidikan dan Data Siswa OAP	



**REKOMENDASI KEGIATAN**  
**KELOMPOK KERJA CERDAS BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN MEI 2026**

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Audiensi Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan Dekan Fakultas Kedokteran, PD-1, Ketua Program Studi, dan Rektorat Universitas Cenderawasih terkait kebijakan transisi masa studi mahasiswa;</li><li>2. Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap mahasiswa terdampak, termasuk status akademik, nilai, portal akademik, dan tunggakan pembayaran;</li><li>3. Perlu adanya penyampaian kebijakan dan solusi akademik secara tertulis dan transparan kepada mahasiswa terdampak;</li><li>4. Perlu dipertimbangkan kebijakan transisi dan penyelesaian akademik bagi mahasiswa tingkat akhir yang terdampak perubahan masa studi;</li><li>5. Perlu dilakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap mahasiswa terdampak dalam proses penyelesaian administrasi dan akademik.</li></ol>
2.	Rapat Koordinasi bersama Rektor UNCEN terkait Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN dan dokter internship terkait permasalahan penempatan koas/dokter muda lulusan Universitas Cenderawasih yang ditempatkan di luar wilayah Papua, Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.	Koordinasi dengan Pihak Kemenkes terkait Status Ban (Karena Menolak Wahana) & Penempatan Wahana Lokal untuk periode agustus 2026
3.	Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Penyusunan Komitmen Kemitraan Bersama Mitra Pembangunan Pendidikan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2026	Rencana Tindak Lanjut untuk Kerjasama terkait Data Pendidikan & Data Siswa OAP

# POKJA PAPUA PRODUKTIF



**BPP**

BADAN PENGARAH PAPUA



**MEI 2026**

Badan Pengarah Papua


Perwakilan Provinsi Papua




**PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PRODUKTIF BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN MEI 2026**

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Sosialisai kegiatan peremajaan sawit Rakyat di Aula BAPPERINDA Kab. Keerom	Selasa 5 Mei 2026	Menyelesaikan kendala administrative serta mempercepat pelaksanaan Peremajaan Sawit di Wilayah Keerom	Sekda Kab. Keerom menegaskan bahwa, segala pengurusan terkait ijin lahan, pembibitan serta hal teknis lain wajib diselesaikan dalam waktu singkat.	
2.	Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua: "Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera" di Hotel Horison Diana Timika.	10 s.d. 13 Mei 2026	<ol style="list-style-type: none"><li>Memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP3OKP, serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua;</li><li>Mengevaluasi pelaksanaan Otsus Papua, khususnya terkait pengelolaan Dana Otsus, efektivitas pembangunan, serta tantangan implementasi di daerah;</li><li>Mendorong sinkronisasi kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Terlaksananya Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua dan Otonomi Khusus Papua Tahun 2026 sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah;</li><li>Tersampainya evaluasi pelaksanaan Otsus Papua yang menunjukkan masih terdapat tantangan pada aspek kesejahteraan masyarakat, pengelolaan Dana Otsus, rendahnya realisasi APBD, keterbatasan data OAP, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan;</li><li>Disepakatinya penguatan tata kelola Dana Otsus melalui interoperabilitas sistem SIPPP, SIPD, dan SIKD guna mendukung perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi berbasis data;</li></ol>	



			<p>sistem pengawasan pembangunan Papua melalui penguatan interoperabilitas sistem dan pelaksanaan RAPPP;</p> <p>4. Menghimpun aspirasi, masukan, dan usulan daerah terkait kebijakan fiskal, regulasi, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan pembangunan daerah di Tanah Papua.</p>	<p>4. Adanya komitmen pembentukan task force interoperabilitas di tingkat pusat dan daerah guna mendukung implementasi sistem pengelolaan Dana Otsus Tahun 2027;</p> <p>5. Tersampainya berbagai aspirasi daerah terkait revisi regulasi Otsus, formula pembagian Dana Otsus, penguatan kewenangan daerah, penanganan masalah pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah Papua;</p> <p>6. Menguatnya komitmen bersama dalam mendukung implementasi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagai prioritas pembangunan Papua.</p>	
--	--	--	--	--	---



3.	Menjadi Narasumber "Kick Off dan Konsolidasi Implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus.	12 Mei 2026	Mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 melalui penguatan pemahaman dan koordinasi pelaksanaan kewenangan khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026, serta mendukung pelaksanaan tugas BP3OKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022.	Terlaksananya Kick Off dan Konsolidasi Implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 yang menghasilkan kesamaan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan kewenangan khusus, serta teridentifikasinya kebutuhan penguatan koordinasi, regulasi, dan kelembagaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.	
----	---	-------------	--	--	---



**REKOMENDASI KEGIATAN**  
**KELOMPOK KERJA PRODUKTIF BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN MEI 2026**

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Sosialisai kegiatan peremajaan sawit Rakyat di Aula BAPPERINDA Kabupaten Keerom	Kelapa sawit pernah mengangkat PAD Keerom sehingga dikatakan Keerom Berjaya karena sawit. Hal ini perlu dilakukan kembali, melalui peremajaan sawit, kab. Keerom akan kembali Berjaya (PAD meningkat).
2.	Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua: "Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera" di Hotel Horison Diana Timika.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP3OKP, dan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan Otsus Papua;</li><li>2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap formula pembagian Dana Otsus serta penyesuaian kebijakan fiskal pascapemekaran enam provinsi di Papua;</li><li>3. Perlu percepatan implementasi interoperabilitas sistem SIPPP, SIPD, dan SIKD disertai pendampingan teknis dan penguatan kapasitas SDM/operator di daerah;</li><li>4. Perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi terkait Otsus Papua, termasuk UU Otsus, PP Nomor 106 dan 107 Tahun 2021, serta PMK terkait pengelolaan Dana Otsus;</li><li>5. Perlu adanya perhatian khusus terhadap permasalahan pendidikan, kesehatan, stabilitas keamanan, konektivitas wilayah, dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil dan DOB;</li><li>6. Perlu dilakukan penguatan pengawasan dan tata kelola Dana Otsus agar lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP);</li><li>7. Perlu dilaksanakan forum koordinasi lanjutan secara berkala guna memantau tindak lanjut kebijakan, program prioritas, dan penyelesaian berbagai permasalahan strategis di Tanah Papua.</li></ol>
3.	Menjadi Narasumber "Kick Off dan Konsolidasi Implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus.	Perlu dilakukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi kewenangan khusus, serta pengawalan dan evaluasi berkelanjutan oleh BP3OKP guna memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua berjalan efektif dan selaras dengan tujuan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.

# POKJA PAPUA SEHAT



**BPP**

BADAN PENGARAH PAPUA

**MEI 2026**

Badan Pengarah Papua

Perwakilan Provinsi Papua



			<p>perkembangan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua, khususnya terkait pengelolaan Dana Otsus dan percepatan pembangunan daerah;</p> <p>3. Menyampaikan aspirasi, masukan, dan permasalahan strategis yang berkembang dalam forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Tanah Papua.</p>	<p>pendidikan, kesehatan, dan stabilitas keamanan;</p> <p>3. Tersampainya berbagai usulan daerah terkait penyesuaian kebijakan fiskal, revisi regulasi Otsus, penguatan kewenangan daerah, serta peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga;</p> <p>4. Menguatnya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif melalui penguatan tata kelola pembangunan dan Dana Otsus.</p>	
<p>3.</p>	<p>Audiensi Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai 5.</p>	<p>Selasa 19 Mei 2026</p>	<p>1. Mendengar aspirasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih terkait permasalahan akademik dan status drop out mahasiswa;</p> <p>2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa akibat perubahan kebijakan masa studi dan kendala administrasi akademik;</p> <p>3. Mendorong koordinasi dan penyelesaian permasalahan antara mahasiswa dengan pihak Fakultas Kedokteran dan Rektorat Universitas Cenderawasih.</p>	<p>1. Teridentifikasinya permasalahan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terdampak perubahan kebijakan masa studi dari 14 semester menjadi 12 semester;</p> <p>2. Mahasiswa menyampaikan kendala terkait status portal akademik, nilai yang belum terinput, kegagalan mengikuti yudisium, pengakuan cuti akademik, serta tunggakan pembayaran;</p> <p>3. Ditemukan adanya ketidaksinkronan koordinasi dan informasi antara pihak Program Studi, PD-1, Dekanat, dan Rektorat terkait kebijakan transisi masa studi;</p> <p>4. BP3OKP melalui Pokja Papua Sehat dan Papua Cerdas akan melakukan pendataan,</p>	



				<p>wawancara, dan koordinasi lanjutan guna mendukung penyelesaian permasalahan mahasiswa terdampak.</p>	
--	--	--	--	---	--



**REKOMENDASI KEGIATAN**  
**KELOMPOK KERJA SEHAT BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN MEI 2026**

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Melaksanakan diskusi bersama dokter internship terkait permasalahan penempatan koas/dokter muda lulusan Universitas Cenderawasih yang ditempatkan di luar wilayah Papua.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak Uncen dan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme serta kebijakan penempatan dokter muda lulusan Papua;</li><li>2. Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan penempatan di luar Papua dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kondisi sosial peserta;</li><li>3. Perlu didorong kebijakan yang memberikan prioritas penempatan dokter muda lulusan Papua di wilayah Papua sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan daerah.</li></ol>
2.	Mediasi dan penyampaian penjelasan mengenai status serta hak atas tanah terkait operasional Fuel Terminal Serui PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua, di Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardyan Ukie Hercahyo S.IK.,M.I.K	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BP3OKP dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua;</li><li>2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap formula pembagian Dana Otsus serta kebijakan fiskal pascapemekaran enam provinsi di Papua;</li><li>3. Perlu percepatan harmonisasi regulasi terkait Otsus Papua guna mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah;</li><li>4. Perlu penguatan tata kelola, pengawasan, dan interoperabilitas sistem pengelolaan Dana Otsus agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;</li><li>5. Perlu adanya perhatian khusus terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan, konektivitas wilayah, dan stabilitas keamanan di wilayah Papua, khususnya daerah terpencil dan Daerah Otonom Baru (DOB).</li></ol>
3.	Audiensi Permasalahan DO Mahasiswa FK UNCEN Ruang Rapat Sekretariat BPP lantai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan Dekan Fakultas Kedokteran, PD-1, Ketua Program Studi, dan Rektorat Universitas Cenderawasih terkait kebijakan transisi masa studi mahasiswa;</li><li>2. Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap mahasiswa terdampak, termasuk status akademik, nilai, portal akademik, dan tunggakan pembayaran;</li><li>3. Perlu adanya penyampaian kebijakan dan solusi akademik secara tertulis dan transparan kepada mahasiswa terdampak;</li><li>4. Perlu dipertimbangkan kebijakan transisi dan penyelesaian akademik bagi mahasiswa tingkat akhir yang terdampak perubahan masa studi;</li><li>5. Perlu dilakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap mahasiswa terdampak dalam proses penyelesaian administrasi dan akademik.</li></ol>



**MEI 2026**



## **KESIMPULAN**

Selama bulan Mei 2026, Anggota Badan Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap isu-isu pembangunan dan implementasi Otonomi Khusus Papua.

Pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan mencakup penguatan koordinasi lintas lembaga, fasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan pendidikan dan kesehatan, partisipasi dalam forum strategis percepatan pembangunan Papua, serta penanganan isu sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Berbagai kegiatan tersebut menghasilkan masukan, informasi, dan rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan tindak lanjut pembangunan di Tanah Papua.

Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan masih perlunya penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Selain itu, diperlukan perhatian berkelanjutan terhadap isu peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, pembangunan pelayanan dasar, serta upaya menjaga stabilitas sosial dan harmonisasi kehidupan masyarakat.



## **PENUTUP**

Demikian laporan bulanan pelaksanaan tugas dan kegiatan Anggota Badan Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP Provinsi Papua periode Mei 2026 disusun sebagai bahan informasi, dokumentasi, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan langkah tindak lanjut guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pelaksanaan Otonomi Khusus yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.